

# Golput dan Reformasi Parpol: menuju Pemilu yang bermakna

Oleh : Arie Sujito

(Sosiolog UGM, Direktur eksekutif Institute for Research and Empowerment)

Pemasangan atribut Parpol di masa kampanye tampak “penuh sesak”, terutama di jalan-jalan utama kota. Jika diamati, memang agak berbeda di desa-desa. Kalau ditelusur ke komunitas perdesaan, pemasangan atribut Parpol tak seramai di kota. Hiruk pikuk dan sepek terjang Parpol dan caleg di kota selama kampanye menjadi petunjuk optimisme. Bentangan spanduk dan baliho bergambar lambang Parpol atau caleg, bendera besar yang di tambatkan pada pohon-pohon, serta bermacam kaos menandakan promosi Parpol dan caleg mengisi hari-hari menjelang Pemilu 2009. Begitupun media cetak dan elektronik. Iklan promosi demikian genar ibarat industri politik menjajakan dagangan, persis seperti iklan produk sabun, yang memamerkan kehebatan “zat pewarna”. Kedahsyatan media membentuk citra politik seolah ampuh mendongkrak harapan baru. Saya menyebut, itu sebagian besar kemungkinan karena keharusan prosedural di masa kampanye. Apalagi, jumlah Parpol juga meningkat tajam, menjadi 38 Parpol (tahun 2009) yang dinyatakan sebagai peserta Pemilu, dibandingkan sebelumnya hanya 24 Parpol (tahun 2004).

Tapi bagaimana respon masyarakat, yang nanti disebut

sebagai pemilih? Pada umumnya, perbincangan di seputar Pemilu pada lingkungan komunitas cenderung sinis, dan meragukan. Tak seramai pemasangan atribut dan tanda gambar, tanggapan para calon pemberi mandat masih datar. Inilah, kemungkinan, sebagai babak penanda kecemasan mengenai penurunan partisipasi warga. Benarkah Golput bisa menggoncang harapan politisi kontestan Pemilu?

Biasanya, faktor pendorong Golput karena ketidakpuasan pada partai politik, sistem Pemilu, atau akumulasi frustrasi politik dalam bentuk ketidakpercayaan pada mekanisme perubahan melalui Pemilu. Melihat bentuknya, Golput bisa saja sebagai eskapisme-apatis, tapi yang menarik dan penting, Golput sebagai gerakan perlawanan aktif. Kategori perlawanan dimaksudkan Golput sebagai instrumen pendidikan politik (*civic education*). Kita tahu, Pemilu di satu sisi merupakan hak warga negara menyalurkan aspirasinya secara kelembagaan. Demikian pula, di sisi lain hak bagi warga negara untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi, antara hak memilih dan hak tidak memilih memiliki nilai yang sama. Pembedanya pada kepentingan mereka.

Di jaman orde baru, Golput hukumnya haram. Banyak stigma meluncur dari pemerintah (politisi berkuasa) dalam mensikapi Golput. Ia dianggap tindakan destruktif, tidak tanggungjawab, tidak nasionalis, penghianat, tidak sadar politik, dan seterusnya. Ibarat hantu membayangi

sepakterjang partai politik menjelang Pemilu. Lihat saja berapa banyak warga masyarakat menjadi korban kesewenang-wenangan negara atas fenomena Golput ini.

Data mengenai angka Golput menunjukkan peningkatan pada tiap episode Pemilu. Pada jaman orde baru angka “partisipasi-mobilisasi” dalam Pemilu dapat dikatakan tinggi, dan dengan demikian jumlah Golput rendah. Namun tak sulit menganalisisnya, bahwa kenyataan itu lebih disebabkan karena Pemilu dilangsungkan dengan cara-cara represif (tekanan keharusan memilih), sehingga keterlibatan pemilih dalam bilik suara mengekspresikan ketakutan pada resiko (Alex Irwan dan Edriana, 1995). Mobilisasi berdampak pada angka keikutsertaan Pemilu. Kerja sistematis birokrasi, aparat militer dan partai yang terkooptasi oleh sistem Pemilu yang buruk, memberi petunjuk bahwa Pemilu di jaman orde baru, hasilnya sudah bisa diprediksi dan direkayasa perolehannya sebelum dilangsungkan pemungutan suara.

Coba kita periksa (table dibawah) di jaman reformasi. Ternyata babak awal Pemilu 1999 mampu memberi harapan baru, meledaknya partisipasi pemilih dalam Pemilu berhasil menekan angka Golput (berkisar 20,21%). Ini memang lumrah, karena harapan perubahan ditambatkan dalam mekanisme elektoral sebagai ekspresi mengoperasikan reformasi, agar pergantian kekuasaan menjadi jalan strategis membenahi sistem politik dan ekonomi Indonesia.

Tahun Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Golput
1971	8,3 %
1977	10,44 %
1982	8,59 %
1987	8,68 %
1992	9,10 %
1997	13 %
1999	10,21%
2004	23,34 %

Sumber : <http://www.indonesia.com/sriipo/2004/04/05/0504uta2.htm>

Meski demikian, ternyata usia harapan perubahan hari demi hari kian merosot. Paling tidak hal itu dapat dicandera dari peningkatan kembali angka Golput sebesar 23,34% pada Pemilu 2004. Jika coba dirujuk dari kenyataan trend Golput terkait dengan Pemilu (<http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/83368?var=1&l=1>), pada tahun 2004 jumlah pemilih terdaftar sebanyak 148.000.369 orang, dan kira-kira 83% (124.449.038) yang menggunakan hak pilihnya. Dengan jumlah itu, suara sah mencapai 113.498.755, sementara suara tidak sah 10.957.925

## Demokrasi Sejauh ini dan Pemilu 2009

Sumbangan awal cukup berharga era reformasi adalah mendorong liberalisasi politik dan kebebasan media massa yang mampu mengungkit partisipasi warga. Reformasi telah mampu menembus kejumatan dan blokade korporatik—negara. Demokratisasi memang menjadi modal politik yang berfungsi mempercepat pembenahan keadaan sistem politik dan ekonomi. Bagian demokrasi menyangkut nilai dan prosedur, menjadi landasan dan alat bagi mencapai tujuan perubahan (KID, 2008).

Berkaca dari proses historik situasi politik selama ini, episode Pemilu senantiasa menjadi babak menarik dalam rotasi kekuasaan Indonesia. Di era reformasi yang telah berlangsung satu dekade, formasi sosial dan dinamika politik telah mengalami perubahan demikian besar. Paling tidak, terukur dari struktur sosial dan pengelompok masyarakat dalam basis politik mengalami kemajuan pesat dibanding masa-masa orde baru. Mes-

(8,81%). Jumlah itu jelas belum mencover secara keseluruhan data lapangan, karena banyak sumber yang bisa mendukung analisis mengenai angka Golput. Dari gejala itu, dapat dinilai bahwa angka Golput yang kian meningkat tentu banyak sebab. Tetapi sebagian besar kalangan menilai, membubungnya Golput tak lebih sebagai wujud ekspresi kekecewaan atas kekuasaan baru yang terbentuk ternyata tak mampu menjawab harapan rakyat, menjebol kebekuan.

Benarkah ini sebagai salah satu tanda, bahwa pesona demokrasi meredup? Konsensus reformasi '98 menjadi titik tolak pembaharuan, dianggap mengalami kemandegan. Atau, Sorensen menyebut kebekuan (2002). Itu tantangan bagi kelanjutan demokratisasi Indonesia saat ini dan dimana mendatang. Soal serius yang terjadi diantaranya, makin defisitnya capaian perubahan (Demos, 2005).

kipun demokratisasi telah berproses, tak berarti capaian substansial telah dituai. Banyak penilaian, demokrasi Indonesia masih bergerak di lintasan prosedural, belum menghasilkan sisi substansial yakni sisi mendasar dari tujuan perubahan (Demos, 2004). Karenanya, banyak aspek yang mesti diperbaiki dan dibenahi.

Menyangkut soal Pemilu 2009. Peristiwa elektoral yang ketiga pasca otoriterisme ini (paling tidak Pemilu untuk memilih anggota parlemen), kemungkinan akan seru, jika dikaitkan dengan kontestasi dan kompetisi peserta Pemilu. Banyak Parpol baru tetapi tokoh lama yang bermetamorfosis. Situasinya juga kian hangat berkenaan dengan makin maraknya konstruksi Pemilu sebagai medan tempur strategis menjawab masa depan politik Indonesia untuk 5 tahun kedepan setelah belajar dua kali Pemilu di rentang reformasi. Apalagi pertarungan Pemilu presiden, jelas kian semarak.

Mari kita putar sedikit urusan Pemilu ini dengan fakta regulasi yang melandasinya. Jika kita simak proses pembuatan UU Pemilu beberapa waktu berlalu yang dianggap begitu "darurat" dan mendesak karena proses negosiasi yang panjang, memang banyak problem yang terkandung di dalamnya. Dalam UU Pemilu yang baru, diatur penetapan calon terpilih dilakukan sesuai nomor urut calon (isu yang selama ini menjadi krusial diperdebatkan secara internal dalam Parpol). Namun, di masing-masing Parpol juga memiliki siasat beragam dalam rangka mendorong praktek kompetitif antar kader. Terjadi pula beberapa perubahan menarik, bahwa pemungutan suara akan dilakukan dengan memberi tanda (mencentang/ mencentang) dan bukan mencoblos, berbeda dulu yang hanya dilakukan dengan mencoblos. Meski demikian, KPU toh akhirnya memberi toleransi jika mencoblos diang-

gap syah karena kemungkinan tradisi ini belum mampu menjangkau sampai sekian luas masyarakat. Kesepakatan unik yang menarik dicermati dalam UU ini, partai kecil yang punya kursi mereka boleh tetap ikut Pemilu tetapi meloloskan *Parlementary Threshold* 2,5 persen, ini sungguh keputusan yang problematik. Demikian pula, pengaturan yang lebih rinci untuk memastikan daftar pemilih lebih akurat, agar kecurangan bisa diminimalisasi dengan misalnya, berita acara itu wajib diberikan ke perwakilan setiap Parpol, Panitia Pengawas dan sebagainya. Kemudian kepastian penyelesaian pelanggaran itu sudah selesai lima hari sebelum KPU mengambil keputusan hasil.

Meski demikian, dapat dinilai secara umum sesungguhnya tak ada kemajuan berarti dalam regulasi Pemilu tersebut, kecuali soal aturan kuota tiga puluh persen (30%) bagi perempuan dalam daftar Calon Anggota Legislatif. Tetapi perubahan teknis cukup mendasar. Sejumlah pihak menilai, beberapa aturan penyelenggaraan Pemilu dalam UU baru ini lebih banyak menguntungkan partai

besar. Hal ini tentu masih *debatable*. Bahkan, yang paling mutakhir soal UU pilpres yang dianggap bermasalah, karena dinilai memblokade calon untuk maju, karena persyaratan tersebut oleh Parpol-Parpol kecil dianggap terlalu berat. Persyaratan pengajuan calon presiden minimal 20% kursi di parlemen dan 25% perolehan suara secara nasional, mengundang reaksi banyak pihak. Wajar saja jika banyak Parpol yang akhirnya mengajukan judicial review untuk urusan ini.

Dalam kalimat lain, UU sekarang ini (sebagaimana modus-modus sebelumnya) tidak dirancang untuk jangka panjang, yang berarti pada Pemilu berikutnya besar kemungkinan akan mengubah UU lagi. Karena UU ini isinya hanya dibuat untuk kepentingan Pemilu 2009 (lebih sebagai kondisi darurat dalam situasi "kepepet", dengan wujud kompromi ada pertautan kepentingan di DPR). Dapatlah dicatat, kedaruratan regulasi dan kelembagaan berpengaruh pada proses Pemilu dan respon pemilihan.

## Fungsi Parpol

Pasca bangkrutnya sistem politik orde baru, konon dianggap dampak bola salju dan gelombang demokratisasi ketiga yang melanda dunia (Huntington, 1991), fase-fase penataan ulang dan pembenahan format politik baru dibutuhkan (Markoff, 1996), terutama untuk pembentukan fondasi dan kerangka dasar bangunan sistem pemerintahan dan masyarakat demokratis (Linz & Stepan, 1996). Diantara acuan mengawali fase pasca otoriterisme (transisional) ini adalah dijalankannya kebijakan multipartai, yakni suatu tatanan regulasi yang tidak terlalu membatasi komposisi Parpol, yang tidak lain adalah bagian prasyarat awal agar kelembagaan demokrasi dipenuhi. Parpol, merupakan salah satu pilar demokrasi pada aras parlementaris yang eksistensinya

sangat penting (Dahl, 1999). Dalam pandangan ini, multipartai terkandung maksud penyediaan ruang dan arena kebebasan warga negara berafiliasi kedalam asosiasi-asosiasi politik, guna mengartikulasi kepentingannya, sekaligus saluran elementer agregasi dasar kepentingan masyarakat.

Ruang kebebasan terbuka lebar setelah segala bentuk represi, pembungkaman serta domestikasi (dibawah kebijakan deideologisasi, depolitisasi dan floating mass) selama 32 tahun itu akhirnya dihentikan secara formal tahun 1998 (reformasi). Sejumlah harapan baru bermunculan, menjadi energi segar membuka cakrawala perubahan. Secara nyata ekspresi itu berwujud dalam bentuk ledakan jumlah Parpol mencapai 48 di tahun 1999 dan, 24 di tahun 2004.

Tumbuhnya Parpol merupakan indikator meningkatnya kesadaran dan partisipasi (secara formal) masyarakat di dalam memanfaatkan institusi politik sebagai alat menyampaikan pendapatnya, agar dapat mempengaruhi kebijakan secara langsung.

Secara teoritis, Parpol memang sangat diperlukan dalam sistem demokrasi. Parpol dianggap sebagai lembaga politik formal berfungsi mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan konstituen, untuk pengambilan kebijakan strategis. Selain itu, Parpol juga berfungsi sebagai lahan semai kaderisasi dan rotasi kepemimpinan paling strategis. Dيسانalah, Parpol menjadi alat perjuangan rakyat yang efektif, diantaranya melalui proses politik yang legitimate. Menggunakan is-

tilah Robert Dahl, Parpol sebagai bagian terpenting masyarakat politik menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif ketika wakil-wakilnya di parlemen menyelenggarakan kontrol efektif terhadap jalannya kekuasaan. Jika keseimbangan dapat dijalankan sesuai konsep-normatif (ini menjadi pengalaman negara-negara maju yang lebih dulu memperagakan demokrasi), dipastikan akan terjadi praktik demokrasi secara benar.

Demokrasi semacam itu menjadi petunjuk pentingnya peran Parpol. Di Indonesia misalnya, saat ini untuk menjadi presiden dan kepala daerah harus melalui pintu partai, lainnya tidak boleh (itulah masalah yang saat ini menjadi bahan perdebatan). Hal itu artinya, sepak terjang Parpol akan berpengaruh pada proses pembangunan demokrasi, karena kenyataannya Parpol memiliki kewenangan, atau otoritas formal demikian besar.

Kecenderungan munculnya Parpol, baik itu katagori baru maupun

metamorfosis Parpol lama menjadi baru, terlihat dengan beberapa hal. Ukuran itu dapat dicandra dari perangkat ideologi, visi dan misi, struktur organisasi, program-program serta strateginya, sampai dengan para aktor penggerak. Struktur sosial dan tata politik yang berubah, tak pelak jika Parpol juga dituntut mengadaptasikan diri, karena pergeseran tantangan bahkan orientasi-orientasi yang dirumuskan. Bahkan, kesemua itu berkonsekuensi pada pilihan strategi perjuangan. Demikian pula, pada arus masyarakat sipil, sejak perubahan formasi kekuasaan era transisional, pembentukan organisasi-organisasi massa, baik itu sifatnya permanen atau adhock, diakui menjadi alat yang dibenarkan untuk menyalurkan kepentingan di era liberalisasi tersebut. (Nico Cana, 2003, 2004). Formasi asosiasi sipil makin terbangun baik itu berbasis klas, etnik maupun kelompok-kelompok kepentingan, di berbagai tingkat.

## Dampak Rapuhnya Parpol

Lepas dari pergulatan soal regulasi Pemilu sebagaimana diilustrasikan diatas, serta dinamik Parpol dan calegnya dalam kampanye, alangkah baiknya kita menelaah lebih jauh dan kritis mengenai kondisi Parpol dalam pertarungan Pemilu di Indonesia semenjak berlangsungnya reformasi, pasca orde baru. Lalu kita bisa menakar derajat representasi idealnya, dan merumuskan agenda perbaikan dan pembenahan kedepan.

Secara singkat, dapat saya sebut Parpol sekarang sedang menderita dua penyakit. Pertama, buta huruf. Mereka tidak memiliki visi dan misi yang jelas atau program reformasi yang konkrit. Kedua, aktivis Parpol keras kepala. Arogansi demikian dominan, dimana mereka tidak mau refleksi atau mengubah dirinya jika mendapatkan kritik, tetapi malah ngamuk. Ini sangat memalukan. (Arie Sujito, 2008)

Saya mencatat, konteks permasalahan di atas itulah yang dapat men-

jelaskan mengapa Golput kemungkinan kembali bangkit tahun 2009. Sebagai kekuatan ekstraparlementer, Golput memberi pelajaran Parpol, agar tidak sewenang-wenang pada rakyat. Masyarakat memiliki *stock of knowledge* yang kian meningkat. Referensi yang didapatkan dari pendidikan politik para aktivis, seperti program-program NGO, pers, ormas, Parpol, mahasiswa, akademisi kampus, dan institusi mediasi lainnya. Termasuk, pengalaman otentik kehidupan politik sehari-hari (*everyday live politics*). Pemilu yang biasanya hanya mengumbar nafsu berkuasa melalui penyebarluasan jargon, mantra-mantra magis untuk menerkam rakyat, tidak akan mampu lagi memperoleh ruang di mata rakyat.

Usia reformasi yang hampir satu dekade, banyak hal semestinya bisa kita jadikan bahan renungan. Perubahan konfigurasi ke arah liberalisasi telah memantik tumbuh suburnya

partai politik (Parpol), selain kebebasan media massa serta maraknya partisipasi warga. Tahun 1999 terdapat 48 Parpol berkontestasi dalam Pemilu, lalu tahun 2004 sebanyak 24 Parpol. Dan, untuk Pemilu 2009 sementara ini terdaftar 38 Parpol (nasional) dan 6 Parpol lokal (di Aceh).

Sebagai fase awal menapak demokrasi yang sifatnya transisional, reformasi telah memberikan ukuran formal dan elementer pada aras prosedur secara formal. Melalui liberalisasi ini, jalur-jalur strategis proses demokrasi makin terbuka, bahkan aliran artikulasi makin jelas, paling tidak secara prosedural (IRE, 2004). Sepak terjang Parpol juga kelihatan, bermacam bentuk sebagai pendidikan politik makin mengairahkan warga, lalu mendorong tumbuhnya kesadaran berdemokrasi. Prestasi itu, secara umum dapat dikatakan menyenangkan yang perlu diapresiasi, karena dampak nyata perkembangan itu adalah pada lapis desa sampai nasional makin tersedia kesempatan dan arena untuk "melek" politik (Klinken, 2008). Mengingat diaman orde baru, kebijakan depolitisasi dan floating massa masa lalu, telah merapuhkan fondasi politik dalam sistem kekuasaan bermasyarakat dan bernegara (Pabottingi, 1996). Akibatnya, demokrasi saat itu tidak mungkin tumbuh dan terbangun. Dalam konteks semacam itulah, jika dibandingkan dengan era orde baru, neraca politik jelas memiliki bobot besar capaian positif era reformasi (Demos, 2005).

Sebagaimana cita-cita reformasi mewujudkan demokrasi politik dan kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan dinamika itu ternyata

atau belum sesuai harapan. Pembiakan Parpol dalam babak perubahan 5 tahun kedua era reformasi, banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan serius, tidak sesuai harapan masyarakat (normatifnya). Parpol sebagai institusi, alat dan kekuatan artikulasi politik warga ternyata banyak mengalami masalah.

Mulai dari wataknya yang oligarkhis, feodal, elitis, korupsi, kekejaman, manipulasi amanat, sampai susahny mereka membangun konsensus dan konsistensi internal yang ditunjukkan berupa maraknya gejala perpecahan disana-sini dalam tubuh Parpol yang kian memprihatinkan. Dari bermacam hasil penelitian yang dilakukan banyak pihak, wacana media massa, sampai tindakan-tindakan praktis kasat mata, pada berbagai arena dan kegiatan membuktikan Parpol-Parpol telah mengidap gejala disorientasi (Arie Djito, 2008). Secara teoritik dan normatif menjadi kekuatan demokrasi, ternyata secara empirik makin tidak terpercay karena para politisi sebagai aktor gagal memainkan perannya sebagai agen demokrasi. Tentu, analisis ini tidak tendensius dan tidak bersifat umum, atau "gebyah uyah". Tetapi, disekumpul forum atau tempat-tempat obrolan komunitas seperti warung-warung, dan komunitas warga makin terasakan hal ini.

Dapat dikatakan, Pemilu 2009, sesungguhnya merupakan pertarungan penting dari pengalaman politik yang sudah-sudah. Apakah Pemilu kali ini mampu mendongkrak partisipasi dengan konsekuensi rakyat bisa diyakinkan atas masa depan 5 tahun ke depan ke arah lebih baik. Ataukah, justru hanyamempertebal ketidakyakinan keadaan, sehingga makin apatis. Soal semacam ini, tentu perlu dijawab oleh banyak pihak yang konsen pada upaya pembenahan demokrasi saat ini dan dimasa-masa mendatang. Beberapa faktor kunci sukses tidaknya Pemilu berkait dengan: (1) penyelenggaraan dan pengorganisasian teknis Pemilu; (2) stabilitas politik dan di-

namika sosial; (3) peran dan inisiatif Parpol dalam strategi berpolitik; (4) kapasitas dan performance kandidat (kualitas); (5) Partisipasi dan respon kritis para pemilih; (6) Daya serap dan tingkat penerimaan kelompok strategis. Kekhawatiran menurunnya jumlah pemilih, misalnya Golput, pragmatisme warga, konflik dan kekerasan, serta keculasan dan manipulasi, dan seterusnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diatas. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasi hal-hal semacam ini secara konstruktif dan lebih dewasa dalam perspektif pembelajaran dan pendewasaan politik.

Muncul sejumlah kekhawatiran, bahwa Pemilu 2009 ini juga diliputi oleh membludaknya Golput. Sebagaimana diilustrasikan dimuka, akumulasi ketidakberesan proses demokrasi menjadi konteks penjelas, mengapa kemungkinan apatisme itu muncul. Jika ditelaah lebih teliti, Golput sebagai bagian gejala politik "pembangkangan" dan absennya partisipasi dalam elektoral, terkait dengan beberapa sebab. Mulai dari urusan teknis sampai dengang soal yang substansial, yakni ideologi politik. Dalam pengertian itu, dapat diklasifikasikan pengertian Golput sebagai berikut.

**Pertama,** kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hak suara secara konstitusional, akan tetapi sebagai subjek Pemilu tidak terdaftar secara definitif sebagai pemilih. Hal ini, biasanya urusan teknis yakni data base yang buruk sehingga banyak warga negara yang semestinya berhak tetapi belum dan tidak terdaftar, karena data yang lemah bisa menjangkau mereka. Apalagi, sistem data untuk bahan kebijakan sangat buruk. Peristiwa ini menimpa banyak kegiatan politik di daerah, seperti Pilkada, dimana sengketa Pilkada biasanya terkait dengan banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Karena urusan teknis, jelas penyelenggara Pemilu (KPU/ KPUD) harus bertanggung jawab atas masalah ini.

**Kedua**, para pemilih yang secara tidak sengaja melakukan kesalahan dalam memberikan suara di bilik suara pada Pemilu. Pengetahuan dan ketrampilan menjadi akar masalah, misalnya berkenaan dengan aturan baru dalam Pemilu yang cenderung rumit sesuai dengan UU Pemilu, sementara transformasi pengetahuan belum terjadi pada pemilih. Jika ini terjadi, memang ada asumsi yang keliru, seolah-olah warga negara (pemilih) sudah mengerti dengan sendirinya jika terjadi perubahan regulasi. Asumsi yang keliru, sementara disisi lain penyelenggara Pemilu (KPU/KPUD) tidak mampu menyampaikan atau menyosialisasikan perubahan teknis dan mekanisme Pemilu, berakibat pada ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan hak pilihnya secara benar. Berikut ini, misalnya, beberapa contoh prosentase Golput di daerah (propinsi) era elektoral lokal.

**Persentase Golput pada Pilkada 2008**

Wilayah	Persentase
Jawa Tengah	45,25 %
Jawa Barat	32,6 %
DKI	37 %
Kalimantan Timur	34,4 %
Sumatera Utara	43 %
Sulawesi Selatan	33 %
Sumatra Barat	39,9%

Sumber : [http://www.suaramerdeka.com/beta1/news/print.php?id\\_news=9133](http://www.suaramerdeka.com/beta1/news/print.php?id_news=9133)

**Ketiga**, kelompok masyarakat yang benar-benar tidak peduli dengan urusan politik, atau khususnya soal Pemilu. Biasanya, kondisi carut marutnya sistem politik di satu sisi, dan urusan pragmatisme disisi lainnya yang melingkupi dirinya jelas menjadi dasar utama, mengapa Pemilu tak menjadi agenda yang dianggap penting bagi seseorang atau kelompok warga semacam ini. Jika ini terjadi, dan dialami kelompok masyarakat, hendaknya menjadi tantangan Parpol dan penyelenggara Pemilu (KPU/ KPUD), berkepentingan untuk mendorong munculnya inisiatif-inisiatif baru membuat terobosan penyajian politik yang lebih menyedot perhatian dan menarik bagi kelompok ini.

**Keempat**, kelompok masyarakat yang secara sadar dan sengat menentang sistem Pemilu dan Parpol, sehingga menjadi alasan kuat untuk enggan berpartisipasi langsung dalam Pemilu. Biasanya, mereka tidak datang dalam bilik suara dan tidak menggunakan hak pilihnya, kemudian ada pula yang sengaja merusak kartu suara sehingga tidak sah dalam hitungan Pemilu. Kelompok ini cenderung "politik dan ideologis" ekspresi perlawanan. Secara historik, golongan ini merupakan kekuatan utama dalam proses pergantian atau rotasi kekuasaan yang dilakukan secara terbuka pernah, sekaligus menjadi legenda dalam perjalanan Pemilu di Indonesia. Golput yang haluan kritis semacam ini, jelas menjadi bagian gerakan partisipasi warga, tetapi dengan cara yang berbeda karena bobot dan orientasinya lebih membangkang dan protes.

**Rincian Golput pada Pemilu Tahun 2004**

Pemilih terdaftar	Pemilih menggunakan haknya	Suara sah	Suara tidak sah
148.000.369	124.449.038 (83%)	113.498.755	10.957.925 (8,81%)

Sumber : <http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/83368?var=1&l=1>

Sejauh ini, kelompok ini senantiasa dikecam oleh undang-undang, apalagi oleh Parpol dan KPU, karena dianggap merugikan peserta Pemilu. Tak heran, jika Parpol dan KPU membuat siasat mengatasi dan membendungnya. Salah satunya, melalui UU Pemilu yang melarang (dengan ancaman pidana) pada gerakan Golput (mereka yang mengajak atau menyerukan) sebagai sikap politik menolak berpartisipasi dalam Pemilu. Tentu alasan-alasan yang melandasi pilihan sikap politik semacam ini lebih kompleks, yakni kaitan sistem politik, sistem Pemilu, dan performance Parpol.

**Rincian Golput pada Pemilu Tahun 2004 (Yang Tidak Datang Ke TPS)**

Pemilih terdaftar yang tidak datang ke TPS	23.551.321
Suara tidak sah	10.957.925
Total Golput	34.509.246

Sumber : <http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/83368?var=1&l=1>

Jika demikian halnya, gejala dan masalah Golput sesungguhnya erat kaitannya dengan teknis dan substansi politik kebijakan serta demokratisasi. Pembinaan penyelenggaraan dan pengorganisasian Pemilu, reform peserta Pemilu (Parpol), dan urusan pendidikan politik bagi pemilih dalam Pemilu, adalah agenda-agenda strategis yang perlu dipikirkan dan dikerjakan untuk merespon kecemasan membanjir Golput.

## Pembenahan Parpol

Diantara masalah itu, bagian ini akan mengajak berdiskusi mengenai perlunya mendorong pembaharuan Parpol, sebagai mesin utama dalam politik Pemilu. Atas dasar itulah, mau tidak mau secara proporsional kita harus benar-benar peka dan reflektif menghadapi masalah ini. Segala capaian positif Parpol dan sejumlah kelemahan mendasar tentu harus dipikirkan untuk dibenahi, jika ingin memastikan Pemilu 2009 akan bermakna positif. Merosotnya kualitas Parpol, makin tidak percayanya (*dis-trust*) warga pada Parpol dan kondisi demokrasi yang makin defisit tentu tidak bisa dibiarkan, karena bisa juga akan mengarah pada kebangkrutan politik. Jika kebangkrutan politik terjadi, betapa mahalnyanya biaya yang sudah dikeluarkan untuk membangun demokrasi ini nantinya akan sia-sia. Apalagi, jika situasi nantinya dijerumuskan para kelompok-kelompok alumni orde baru untuk kembali ke jaman masa otoriter. Apa yang musti dikerjakan oleh Parpol? Bagaimana membenahinya?

*Pertama*, sudah saatnya Parpol kembali merumuskan dan mendalami ideologi yang selama ini cenderung diabaikan. Dijaman pragmatis saat ini, partai lupa diri seolah ideologi tidak penting. Segalanya diukur dengan uang, dimana perjuangan semilitan apapun dari kader selalu dikalahkan oleh mereka yang berduit. Hal ini berbahaya, karena kader-kader Parpol bisa rusak mentalnya akibat jebakan pragmatisme. Harus ada pendidikan kader yang sistematis, mengenai peran Parpol dan parlemen dalam sistem demokrasi.

*Kedua*, rekrutmen Parpol yang harus selektif atas dasar komitmen dan kapasitas. Parpol adalah alat perjuangan, bukan sekadar tempat mengadu nasib, sambilan dan asal-asalan. Karena itu, Parpol harus membenahi inputnya yakni merekrut para calon kader yang memiliki komitmen yang jelas, kecerdasan dan pengetahuan yang memadai, dedikasi organisasi serta keseriusan dalam berkomitmen.

Jangan sampai Parpol menampung para aktor politik bermental petualang yang "hobinya berpindah-pindah kendaraan", apalagi patut dipertanyakan arah dan komitmennya. Kader-kader Parpol harus memiliki pengetahuan mengenai sistem politik Indonesia, sistem kepartaian dan tata pemerintahan, serta perspektif pembangunan demokrasi. Secara spesifik juga trampil dan paham dalam hal legal drafting, membaca dan analisis anggaran (APBD/ APBN), kemampuan agregasi dan artikulasi kepentingan, pemahaman gender dan politik, dan seterusnya berkenaan dengan tugas dan peran lembaga-lembaga politik. Hal ini dibutuhkan, agar para kader Parpol yang nantinya diproyeksi mengisi struktur parlemen telah memiliki kemampuan dan mengadaptasi kebutuhan yang seharusnya melekat dalam anggota Parpol dan parlemen tersebut.

*Ketiga*, Parpol perlu mengembangkan tata kelola (*governance*) internal yang bersih, sehat dan demokratis. Sejauh ini, Parpol identik dengan ketidakberesan mengelola organisasi, yang memperburuk citranya dimata masyarakat. Hal ini harus segera dibenahi, dengan maksud menerapkan mekanisme kerja dalam Parpol yang egaliter, transparansi, partisipatif sebagaimana menjadi cerminan institusi politik modern.

*Keempat*, Parpol perlu segera membuat kerangka program dan kerja dengan rute perubahan yang jelas dan sistematis. Saya percaya Parpol sudah merumuskan visi dan misi, serta platform dan rencana kerja. Tetapi pada umumnya program itu tidak dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi empirik, serta orientasi-orientasi yang berpatokan pada skema ideologi Parpol. Banyak kegiatan yang sangat artifisial, instan, cenderung tidak mempertautkan antara pendekatan strategi pragmatis dan misi ideologis dari Parpol itu. Akibatnya, program kerja Parpol ibarat seperti sirkus dan sambil lalu saja.

**Kelima**, Parpol perlu konsistensi menjalankan program itu selama lima tahun, dan senantiasa direview tiap tahun untuk memastikan apakah capaian-capaian strategis itu bermanfaat bagi konstituen, bagi Parpol maupun pada sistem politik secara umum. Disejumlah kasus, Parpol hanya bekerja 1 tahun menjelang Pemilu, dimana mereka berkepentingan. Cara ini buruk dengan akibat Parpol tidak populer karena tidak memperhatikan nasib pemilih atau konstituennya.

Segala capaian, problem, tantangan serta input-input sebagaimana diuraikan diatas semoga berguna untuk menegakkan salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni Parpol yang betul-betul menjadi lembaga representasi secara otentik, sehingga Pemilu 2009 betul-betul berkualitas. Dengan begitu, Parpol hendaknya lebih dewasa dan strategis dalam merespon gejala Golput. Tak sekadar reaksioner, emosional dan defensif. Pada akhirnya, Parpol dituntut lebih objektif dan realistis mengikuti kemauan rakyatnya. Seharusnya Golput menjadi tantangan Parpol mengubah dan mentransformasikan watak dirinya, dari sekadar hasrat berkuasa menjadi alat perjuangan rakyat menuju kesejahteraan dan keadilan sosial. Dan, bukan sebagai ancaman mematikan. Jika Golput disikapi dengan emosional, dengan cara mempidanakan (persis strategi yang dipakai rezim orde baru), jelas mendapatkan perlawanan serupa dari rakyatnya. Saya yakin, UU yang mengatur Golput (terintegrasi dalam UU Pemilu) tidak mampu membendung sikap kritis massa rakyat yang telah melembaga sebagai gerakan *civil disobedience*.

Tujuan besar yang perlu dikonsolidasikan, dan dilakukan secara konsisten berkenaan dengan momentum Pemilu adalah, agar Pemilu lebih bermakna dalam demokratisasi, yakni partisipasi pemilih yang cukup tinggi (kuantitas dan kualitasnya), performance Parpol cukup baik (program dan caleg yang menjadi motor penggerak), serta tingkat kepercayaan dan daya dukung hasil Pemilu yang tidak diragukan atas hasil Pemilu.

